

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Perimbangan Keuangan Daerah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Daerah (Pemerintah Kabupaten Bogor)

*Economic growth,
District Own
Source Revenue*

033

Hendra Setiawan dan Tunggal Ika Saputra

*Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor, Indonesia
Email: lemlit@stiekesatuan.ac.id*

Submitted:
JANUARY 2018

ABSTRACT

Accepted:
MARCH 2018

This research is purposed to determine whether the Economic Growth District Own Source Revenue and Fiscal balance transfers from the centra government to regions significantly affect Capital Expenditure Budget Allocation. Region in Bogor District. The research method used is descriptive method using secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics of Bogor and the Office of Financial Management and Expenditure Bogor District. Data collecting methods applied in this study are documentation and literature studies with a quantitative approach. The analysis performed in this study is using bivariate correlation analysis - Pearson correlation, due to data showing their mutual relations. Once data is collected, the data were analyzed using SPSS to test Economic Growth, District Own Source Revenue and Fund Balance significantly related to the Capital Expenditure either partially with significance test correlations and simultaneously. The analysis tool used is using the SPSS (Statistics Product and Service Solution) version 22. Results from this research showed that variables Economic Growth has a significance value of 0.041, which sig. below 0.05, so the variables Economic Growth partially related to the Capital Expenditure and had a positive correlation coefficient of 0.894, which means having a strong correlation. Variable District Own Source Revenue has a significance value of 0.010, which sig. below 0.05, so the variable District Own Source Revenue partially related to the Capital Expenditure and had a positive correlation coefficient of 0.960, which means having a strong correlation. Variable Balance Fund has a significance value of 0.005, which sig. below 0.05, so the variable Balance Fund partially related to the Capital Expenditure and had a positive correlation coefficient of 0.974, which means having a strong correlation. Based on the testing that was done on the Economic Growth, District Own Source Revenue, and Fund Balance acquired the R value of 0.996, which means jointly independent variable is interconnected with the Capital Expenditure budget allocations.

Keywords: *Economic Growth, District Own Source Revenue, Fiscal balance transfers from the central government to regions, dan Capital Expenditure.*

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 6 No. 1, April 2018
pg. 033- 042
STIE Kesatuan
ISSN 2337 – 7852

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana tertulis pada pasal 156 ayat 2 dimana dalam melaksanakan kekuasaan, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah.

Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah yaitu membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Dengan demikian Undang-undang tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan mendasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, anggaran daerah disebut sebagai APBD yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik itu provinsi, kota, ataupun kabupaten. Permendagri (No. 52 tahun 2015) Pemerintah daerah serta lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin serta investasi. Abdul Halim (2008, 96) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh, dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan serta mensejahterahkan masyarakatnya. Untuk meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah.

Pengembangan potensi akan menciptakan pendapatan asli daerah bagi yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan. Pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional. Kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang optimal, akan membawa dampak yang baik bagi keuangan suatu negara, sehingga pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Fungsi desentralisasi memberikan harapan dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan antar-daerah melalui dana yang diberikan oleh pemerintah pusat, yang disebut dengan Dana Perimbangan.

Besarnya porsi perimbangan keuangan daerah dalam APBD, membuat dana perimbangan berperan sangat penting bagi pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pemerintah daerah melakukan berbagai cara dalam meningkatkan pelayanan publik, yang salah satunya dilakukan dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi modal yang direalisasikan melalui belanja modal. Kebijakan pengalokasian anggaran belanja modal yang dibuat oleh pemerintah daerah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga dapat dirasakan adanya peranan pemerintah daerah tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Menurut Sadono Sukirno (2013, 10) “Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat”.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah “Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan menurut Abdul Halim (2008, 96) pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu: “Semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah”.

Penyelenggaraan desentralisasi tentunya memerlukan sumber pendanaan yang besar. Penyerahan urusan dan pemberian sumber pendanaan dalam bentuk kebijakan perimbangan keuangan pada daerah otonom, pada hakikatnya ditujukan untuk memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam menyikapi aspirasi masyarakat dan prioritas daerah guna mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat di daerah, serta secara lebih luas diharapkan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, dalam pasal 1 ayat 19 menjelaskan pengertian Dana Perimbangan adalah “Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah, dalam pasal 167 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah ini diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal adalah: Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk

digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan.

Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah:

1. Hipotesis statistik berdasarkan perhitungan regresi
- H_0 = Diduga Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Perimbangan Keuangan Daerah secara simultan dan parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal Daerah
 - H_1 = Diduga Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal Daerah
 - H_2 = Diduga Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal Daerah
 - H_3 = Diduga Perimbangan Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal Daerah
 - H_4 = Diduga Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Perimbangan Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal Daerah
2. Hipotesis statistik berdasarkan perhitungan koefisien korelasi
- H_0 = Diduga Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Perimbangan Keuangan Daerah secara simultan dan parsial tidak berhubungan signifikan dengan pengalokasian anggaran Belanja Modal Daerah
 - H_1 = Diduga pertumbuhan ekonomi berhubungan signifikan secara parsial dengan belanja modal.
 - H_2 = Diduga pendapatan asli daerah berhubungan signifikan secara parsial dengan belanja modal.
 - H_3 = Diduga perimbangan keuangan daerah berhubungan signifikan secara Parsial dengan belanja modal.
 - H_4 = Diduga Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Perimbangan Keuangan Daerah secara simultan berhubungan signifikan dengan pengalokasian anggaran Belanja Modal Daerah

Pengaruh tingkat signifikan dalam penelitian ini adalah 0,05. Untuk membuktikan bahwa H_0 diterima atau ditolak dalam penelitian, diperlukan *P-value* yang didapatkan dari $F \geq a = 0.05$, maka H_0 diterima dan H_0 ditolak. Hal ini dapat diartikan bahwa secara bersamaan variabel *independend* (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel *dependend* (Y). Tetapi, ketika *P-value* dari $F \leq a = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_0 diterima, secara bersamaan semua variabel *independend* (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel *dependend* (Y).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua sampel dari instansi pemerintah yang berbeda, yaitu Badan Pusat Statistik dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor. Data kuantitatif berupa Laporan Pertumbuhan Ekonomi dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bogor dari tahun 2010 sampai dengan 2014.

1. Variabel *Independent* (X)

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel *independent*, diantaranya:

- a) Variabel pertama yaitu Pertumbuhan Ekonomi (X_1), merupakan indikator dalam menunjukkan kondisi perekonomian daerah yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan penggunaan barang dan jasa yang diproduksi oleh berbagai golongan dalam masyarakat (termasuk belanja yang dilakukan oleh pemerintah).
- b) Variabel kedua yaitu Pendapatan Asli Daerah (X_2) Pendapatan yang diperoleh daerah melalui hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
- c) Variabel ketiga yaitu Perimbangan Keuangan Daerah (X_3), merupakan alokasi APBN yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Total Dana Perimbangan yaitu jumlah dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak ditambah dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

2. Variabel *Dependent* (Y)

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel *dependent* (Y) adalah Belanja Modal Daerah yang merupakan bagian dari Belanja Langsung yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta merupakan salah satu komponen belanja yang bersifat publik.

Metode statistik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

Analisis Regresi

Adapun formula regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Belanja Modal (BM)
 α = konstanta
 b_1, b_2, b_3 = koefisien regresi
 X_1 = Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)
 X_2 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 X_3 = Dana Perimbangan (DP)
e = standar error

Dimana sebelum melakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik, yaitu: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokolerasi dan uji heteroskedastisitas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menguji apakah data penelitian ini terdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui melalui dua cara, yaitu analisis grafik dan analisis statistik (K-S test):

Tabel 1. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PDRB Harga Berlaku	PAD	DP	BM
N		5	5	5	5
Normal Mean		9519195407400	907235000600	199564492540	122962488040
Parameter		0.00	.00	0.00	0.00
s ^{a,b}	Std. Deviation	1898473861934	438099782147	382514851908	422295735789
Most Extreme	Absolute	.200	.160	.186	.219
Differences	Positive	.200	.160	.172	.191
	Negative	-.132	-.121	-.186	-.219
Test Statistic		.200	.160	.186	.219
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}

Mengacu pada tabel one-sample Kolmogorov-Smirnov test, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) dari masing-masing variabel sebesar 0,200, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka, keputusan yang diambil adalah menerima H₀, yakni sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Tabel 2. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)	67278220	3849580917			
	73531.950	841.099			
PDRB Harga Berlaku	-.058	.026	-2.597	.006	165.325
PAD	5.574	2.806	5.783	.001	994.090
DP	-2.533	2.009	-2.295	.003	388.253

Semua variabel bebas tersebut memiliki nilai VIF lebih besar dari 10. Artinya, nilai tersebut menjelaskan bahwa variabel tersebut memiliki persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya.

Dengan demikian, penggunaan teknik analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh sebab-akibat antara satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini, tidak dapat digunakan. Karena data yang diperoleh dan digunakan dalam pengujian ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik (resiprokal) dengan kata lain tidak memenuhi standarnya melalui uji asumsi klasik.

Tabel 3. Correlations

		PDRB Harga Berlaku	PAD	DP	BM
PDRB Harga Berlaku	Pearson Correlation	1	.981 ^{**}	.950 [*]	.894 [*]
	Sig. (2-tailed)		.003	.013	.041
	N	5	5	5	5
PAD	Pearson Correlation	.981 ^{**}	1	.992 ^{**}	.960 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.003		.001	.010
	N	5	5	5	5
DP	Pearson Correlation	.950 [*]	.992 ^{**}	1	.974 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.013	.001		.005
	N	5	5	5	5
BM	Pearson Correlation	.894 [*]	.960 ^{**}	.974 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	.041	.010	.005	
	N	5	5	5	5

Mengacu pada *output* tabel uji korelasi diatas, dapat diketahui bahwa PDRB Harga Berlaku memiliki hubungan yang sangat kuat/erat dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,981. Nilai koefisien korelasi Pearson yang positif dapat diartikan bahwa semakin tingginya peningkatan PDRB (Pertumbuhan Ekonomi), maka semakin tinggi pula peningkatan yang terjadi pada Pendapatan Asli Daerah.

PDRB Harga Berlaku memiliki hubungan yang sangat kuat/erat dengan DP (Dana Perimbangan) yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,950. Nilai koefisien korelasi Pearson yang positif dapat diartikan bahwa semakin tingginya peningkatan PDRB, maka semakin tinggi pula peningkatan yang terjadi pada Dana Perimbangan.

PDRB Harga Berlaku memiliki hubungan yang sangat kuat/erat dengan BM (Belanja Modal) yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,894. Nilai koefisien korelasi Pearson yang positif dapat diartikan bahwa semakin tingginya peningkatan PDRB, maka semakin tinggi pula peningkatan yang terjadi pada Belanja Modal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan yang sangat kuat/erat dengan Dana Perimbangan (DP) yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,992. Nilai koefisien korelasi Pearson yang positif dapat diartikan bahwa semakin tingginya peningkatan yang terjadi pada PAD, maka semakin tinggi pula peningkatan yang terjadi pada Dana Perimbangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan yang sangat kuat/erat dengan Belanja Modal (BM) yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,960. Nilai koefisien korelasi Pearson yang positif dapat diartikan bahwa semakin tingginya peningkatan yang terjadi pada Pendapatan Asli Daerah, maka semakin tinggi pula peningkatan yang terjadi pada Belanja Modal.

Dana Perimbangan (DP) memiliki hubungan yang sangat kuat/erat dengan Belanja Modal (BM) yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,974. Nilai koefisien korelasi Pearson yang positif dapat diartikan bahwa semakin tingginya peningkatan yang terjadi pada Dana Perimbangan, maka semakin tinggi pula peningkatan yang terjadi pada Belanja Modal.

Masing-masing variabel memiliki nilai Sig. (2-tailed) < 0,05. Artinya semua variabel X memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel Y.

Tabel 4. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.996 ^a	.991	.966	77984379267.115	3.230

Dari hasil pengujian dihasilkan nilai R yaitu sebesar 0,996, artinya secara bersama-sama variabel tersebut memiliki hubungan yang kuat/erat. Kemudian, dilihat dari uji signifikansi masing-masing variabel yang memiliki hubungan signifikan.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis uji asumsi klasik pada uji multikolinearitas terjadi gejala multikolinearitas hal ini ditandai dengan besarnya nilai VIF > 10 oleh tiap-tiap variabel bebas. Artinya data dari variabel tersebut dikatakan bersifat bolak-balik, jika variabel yang satu mempengaruhi variabel lainnya demikian sebaliknya.
2. Hasil analisis korelasi Pertumbuhan Ekonomi dengan pengalokasian anggaran Belanja Modal di pemerintah Kabupaten Bogor memiliki hubungan kuat/erat yang signifikan dengan nilai korelasi positif. Artinya apabila terjadi kenaikan pada Pertumbuhan Ekonomi, maka pengalokasian anggaran Belanja Modal turut naik, dan demikian sebaliknya.
3. Hasil analisis korelasi Pendapatan Asli Daerah dengan pengalokasian anggaran Belanja Modal di pemerintah Kabupaten Bogor memiliki hubungan kuat/erat yang signifikan dengan nilai korelasi positif. Artinya apabila terjadi kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pengalokasian anggaran Belanja Modal turut naik, dan demikian sebaliknya.
4. Hasil analisis korelasi Dana Perimbangan dengan pengalokasian anggaran Belanja Modal di pemerintah Kabupaten Bogor memiliki hubungan kuat/erat yang signifikan dengan nilai korelasi positif. Artinya apabila terjadi kenaikan pada Dana Perimbangan, maka pengalokasian anggaran Belanja Modal turut naik, dan demikian sebaliknya.
5. Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Perimbangan Keuangan Daerah secara bersama-sama (simultan) memiliki hubungan yang kuat dan signifikan dengan pengalokasian anggaran Belanja Modal di pemerintah Kabupaten Bogor.

SARAN

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Giatkan pembangunan ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga aktivitas perekonomian di daerah kabupaten Bogor akan menjadi lebih baik, dan masyarakat dapat berkontribusi bagi pemerintah daerah melalui pajak yang diterima pemerintah daerah.

2. Pemerintah daerah harus menggali atau memanfaatkan potensi yang ada pada kabupaten Bogor, seperti mengembangkan tempat wisata alam, perbanyak pendirian reklame, mempermudah perizinan suatu usaha seperti : penginapan, hotel atau restoran, sehingga berdampak pada penerimaan PAD.
3. Pemerintah daerah terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat terkait permintaan dana perimbangan yang disesuaikan dengan besarnya pembangunan daerah atau kegiatan pemerintah daerah.
4. Bagi peneliti selanjutnya, yang tertarik dengan permasalahan yang serupa, disarankan agar penelitian dilakukan pada objek lain, misalnya pada pemerintah Kota Bogor, Kota Depok, atau pun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan variabel bebas lainnya dalam rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang, sehingga dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono. 2011. *Aplikasi Analisis Multivarite dengan Program IBM SPSS19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Katalog BPS : 9203.3271. 2015. *Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014*. Badan Pusat Statistik Kota Bogor
- Lubis, I.S. *et al.* 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Medan : Tesis Program Pascasarjana Ekonomi USU.
- Mankiw, N.G., Quah E., dan Wilson P., 2014. *Pengantar Ekonomi Makro: Edisi Asia. Alih Bahasa: Biro Bahasa Alkemis*. Salemba Empat, Jakarta.
- _____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. C.V Andi Offset, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran.
- Setiawan, B. 2015. *Teknik Praktis Analisis Data Penelitian Sosial dan Bisnis dengan SPSS*. Edisi pertama, ANDI, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, Bandung.
- Sukirno, S. 2013. *Teori Pengantar Makroekonomi*. Edisi ketiga, cetakan ke-21, Rajawali Pers, Jakarta.
- Syaiful. Pengertian Dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang Dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan. [Internet]. [Diakses pada tanggal 2 Oktober 2015]. Tersedia pada: www.ksap.org/Riset&Artikel/Art16.pdf

*Economic growth,
District Own
Source Revenue*

042